



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 100-0-100 DI JAKARTA GUNA
PENINGKATAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL
(Kajian dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan)**

*Implementation of the Policy of the 100-0-100 Program in Jakarta to
Improve*

*the Social Condition of the Community in the Framework of National
Resilience*

(Study in the Perspective of Development Communication)

BENEDICTA FELICIA ANDRIES¹, RIRIT YUNIAR²

¹Benedicta Felicia Andries; Email: feliandries@gmail.com

²Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila; Email: rirityuniar@gmail.com

ABSTRAK. Masyarakat Indonesia mengalami kondisi kehidupan yang terus berubah supaya dapat tetap bertahan ditengah arus pembangunan dunia. Dibutuhkan ketahanan sosial masyarakat untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk program 100-0-100 dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, permukiman layak, dan sanitasi layak. Program 100-0-100 ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap mendapatkan kehidupan sosial yang layak berdasarkan UUD 1945. Kesejahteraan sosial masyarakat menjadi hal yang penting untuk dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya pembangunan di negara Indonesia. Urgensi penelitian ini adalah ditemukannya kesenjangan antara program kebijakan dengan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah setempat kepada masyarakat yang masih belum dapat berjalan dengan baik. Gangguan komunikasi yang terjadi membuat terhambatnya pelaksanaan program 100-0-100 terutama bagi masyarakat di Kampung Kesepatan, Cilincing, Jakarta Utara. Maka dari itu, diperlukan komunikasi pembangunan yang jelas dan terarah dari pemerintah kepada masyarakat melalui sosialisasi guna mempermudah pelaksanaan program 100-0-100 agar dapat tercipta ketahanan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Kondisi Sosial Masyarakat, Komunikasi Pembangunan, Implementasi Kebijakan*

ABSTRACT. Indonesian people experience changing living conditions so that they can survive amidst the current world development. Community social resilience is needed to face the changes that occur. In response to this, the Indonesian government established a 100-0-100 program under the coordination of



the Ministry of Public Works and Public Housing to complete community needs for clean water, proper housing and proper sanitation. The 100-0-100 program is aimed to helping underprivileged people to continue have a decent social life based on the UUD 1945. The social welfare of the community is an important thing in being able to increase the social resilience of the community to realize the fulfillment of development in Indonesia. The urgency of this research is due to the discovery of gaps between the policy and social realities. This study aims to describe the communication process carried out by the local government to the community, which is still not running well. The communication problems that occurred hampered the implementation of the 100-0-100 program, especially for the people in Kampung Kesepatan, Cilincing, North Jakarta. Therefore, it requires clear and directed development communication from the government to the society through socialization in order to facilitate the implementation of the 100-0-100 program in order to create community social resilience.

Keywords: *Social Community Condition, Communication Development, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dihadapkan pada kondisi kehidupan yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam menghadapi kondisi dinamika tersebut, masyarakat Indonesia perlu memiliki ketahanan nasional untuk menghadapinya. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakekat dan pengertian bahwa yang ada di dunia ini

selalu berubah dan perubahan juga akan berubah mengikuti perkembangan dunia. Upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang baik.

Ketahanan Nasional secara sederhana diterjemahkan sebagai kemampuan untuk pulih dari kondisi tidak terduga. Menurut Lemhannas (1997), penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas-asas kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa ada setiap saat dalam kehidupan nasional, tergantung dari kondisi nasional dan internasional serta situasi yang dihadapi. Konsepsi ketahanan nasional merupakan konsepsi nasional dalam mencapai tujuan nasional, yang pada intinya adalah tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya hal



tersebut juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Suatu rumusan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu "Pemerintahan Negara" yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tercapainya tujuan nasional tidak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamis kehidupan nasional yang terintegrasi dan harus diwujudkan pada suatu waktu, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, diperlukan konsepsi ketahanan nasional, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan kata lain, pada saat menyelesaikan masalah keamanan harus turut serta memikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya.

Dalam mencapai kehidupan nasional yang baik, masyarakat perlu mendapatkan kehidupan yang layak tanpa terkecuali. UUD 1945 menjamin hak kelayakan hidup dari setiap lapisan masyarakat agar tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Kehidupan sosial yang baik tersebut tentunya tidak terlepas dari terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia sendiri. Orientasi pencapaian kesejahteraan bagi pembangunan di Indonesia sampai saat ini masih bersifat *Java-centric*, sehingga menjadikan DKI Jakarta sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta diyakini memiliki angka taraf hidup yang tinggi karena pertumbuhan dan pembangunan yang terjadi – terutama di sektor ekonomi. Hal tersebut berdasarkan hasil data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melalui Susenas pada bulan September 2018. Dijelaskan bahwa pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,42 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah (sumber: bps.go.id).

Dengan hasil data yang menunjukkan angka ketimpangan rendah, tidak



memberikan kepastian bahwa masyarakat DKI Jakarta terjamin kehidupannya secara menyeluruh. Masih terdapat kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan standar kelayakan hidup yang diklasifikasi oleh pemerintah sendiri. Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Doni Widiantoro merincikan bahwa masih terdapat kawasan kumuh di wilayah DKI Jakarta. Ironis ketika mengetahui DKI Jakarta sebagai orientasi pembangunan di Indonesia justru masih memiliki masalah dalam menangani kawasan kumuh. Kawasan kumuh tersebut banyak ditemukan di Jakarta Utara sebesar 39 persen, kemudian Jakarta Barat 28 persen, Jakarta Selatan 19 persen, Jakarta Timur 12 persen, Jakarta Pusat 11 persen, dan Kepulauan Seribu 1 persen (sumber: poskotanews.com). Selain itu, BPS juga merilis data mengenai kondisi permukiman kumuh di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa Jakarta Utara merupakan daerah dengan tingkat permukiman kumuh nomor satu, padahal Jakarta Utara tidak masuk dalam peringkat tiga teratas dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi (sumber: bps.go.id).

Salah satu kawasan kumuh di Jakarta Utara yang terdapat dalam data BPS adalah

Kelurahan Cilincing, Kecamatan Rorotan, dimana salah satu kampung tersebut menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS Jakarta Utara pada tahun 2019 ini, Rorotan hanya memiliki satu tempat untuk buang air besar, dan hanya terdapat satu saluran pembuangan air limbah rumah tangga dengan kondisi tergenang menurut data tahun 2014. Sedangkan jumlah penduduk di Rorotan sebesar 10,637 jiwa dengan persentase rumah permanen sebesar 48,38 persen menurut data tahun 2011 (sumber: jakutkota.bps.go.id). Menurut data yang dihimpun, tidak mengherankan terdapat suatu efek yang timbul dari kondisi tersebut, yaitu banjir rob ketika hujan deras turun. Sehingga pada saat terjadi banjir besar di Jakarta pada awal tahun 2020, warga Kampung Kesepatan terpaksa mengungsi ke dalam peti kemas milik perusahaan logistik yang berada dekat permukiman karena tempat tinggal mereka terendam banjir (sumber: cnbcindonesia.com).

Kondisi permukiman yang tidak layak huni dapat menimbulkan kerawanan dan masalah kesehatan. Sedangkan Kementerian Sosial menetapkan ketiadaan dari akses air yang sehat, akses untuk mandi, cuci, dan



kakus, serta bahan bangunan yang tidak permanen adalah beberapa aspek yang dapat menyatakan rumah yang tidak layak (sumber: kemsos.go.id). Menteri Kesehatan juga telah menetapkan air yang seharusnya dapat dinyatakan layak untuk digunakan masyarakat adalah air yang tidak tercemar, baik dari sektor domestik ataupun industri, dan memiliki lingkungan sekitar yang bersih. Selain itu air yang digunakan tidak memiliki kemungkinan kontaminasi dari cemaran minyak yang dapat menimbulkan warna dan bau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 (sumber: hukor.kemkes.go.id). Kondisi lingkungan hidup di Kampung Kesepatan masih kontradiksi dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Hal tersebut dikarenakan bangunan rumah yang sebagian besar bersifat sementara dan lokasi permukiman yang tidak terawat membuat masyarakat kesulitan untuk memiliki akses air bersih.

Menilik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menangani problematika tersebut adalah dengan membentuk program 100-0-100 yang dikoordinasi oleh Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penjelasan program 100-0-100 ini adalah 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh sampai 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi. Program yang diupayakan pemerintah tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan merupakan bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 (Sumber: nasional.kontan.co.id). DKI Jakarta masuk ke dalam fokus penanganan mengenai air layak konsumsi, rumah layak huni, dan sanitasi layak untuk masyarakat pada tahun 2016-2017. Hal tersebut dipaparkan melalui presentasi Kebijakan, Strategi dan Program Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan oleh Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2016 (sumber: ciptakarya.pu.go.id). Tentu perencanaan program tersebut diharapkan dapat mereduksi angka permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas air yang layak bagi masyarakat Indonesia.

Realisasi program 100-0-100 sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang kehidupannya masih kurang baik secara jasmani ataupun rohani. Program 100-0-100 merupakan salah satu program yang dirasa



tepat untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di Kampung Kesepatan. Namun sangat disayangkan sampai saat ini masih belum dilaksanakan sosialisasi atau pelaksanaan program tersebut dari pemerintah lokal. Sedangkan kondisi masyarakat di Kampung Kesepatan masih jauh dari kriteria yang terdapat dalam rencana pembangunan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini hendak mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan hendak memberikan solusi alternatif bagi pemangku kebijakan agar dapat mengembangkan potensi diri masyarakatnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat membuka pandangan dari masyarakat yang termarginalkan. Sehingga dapat mewujudkan kondisi dinamis bangsa Indonesia karena keterlibatan seluruh pihak dalam proses pembangunan nasional.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi tentang implementasi kebijakan sosial yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan realisasinya di tingkat Kelurahan Rorotan. Informasi yang

mendalam ini dilihat dari pemahaman pemerintah setempat dan masyarakat mengenai kebijakan program 100-0-100 yang diupayakan pemerintah pusat sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai komunikasi pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat terkait pelaksanaan program 100-0-100 di tingkat Kelurahan Rorotan sebagai bagian dari Kota Jakarta Utara, yakni kota dengan permukiman kumuh nomor satu di wilayah DKI Jakarta (sumber: bps.go.id). Unit analisis dari penelitian ini adalah Kelurahan Rorotan sebagai bagian dari aparat pemerintah, dan *stakeholder* di Kampung Kesepatan sebagai bagian dari masyarakat. Kedua elemen tersebut menjadi fokus unit penelitian agar dapat menjelaskan kondisi secara berdasarkan perspektif yang berbeda. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara *key informan* yang terdiri dari Lurah Rorotan, Ketua Kelompok Warga Kampung Kesepatan, dan Ketua Sanggar Belajar Orang Pinggiran. Selain itu, teknik pengumpulan data juga menggunakan observasi dan dokumentasi yang dielaborasi dengan data sekunder berupa kajian



literatur, regulasi, dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

PEMBAHASAN

Keuletan dan Ketangguhan Masyarakat dalam Peningkatan Kapasitas SDM Sebagai Fondasi Pembangunan

Proses pembangunan yang terjadi di dunia tumbuh beriringan dengan kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi sejak abad ke-20. Maka dari itu diperlukan keuletan dan ketangguhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan tersebut. Dalam proses pembangunan tentunya terdapat dampak yang dihasilkan, dan tidak sedikit dampak negatif yang timbul karenanya. Negara yang belum siap dalam menghadapi pembangunan akan sulit melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kemajuan teknologi yang terus berkembang justru kontradiktif dengan tujuan pengembangan teknologi itu sendiri. Kemajuan yang terjadi pada satu sisi mengasingkan masyarakat, mencemari lingkungan, pemborosan sumber daya, dan terutama menimbulkan kekhawatiran bagi negara berkembang karena tidak sesuai dengan nilai yang selama ini berkembang dalam masyarakatnya.

Keadaan tersebut membuat yang miskin semakin miskin, ketika keperluan semakin bertambah namun tidak dapat dipenuhi. Sekalipun hal-hal tersebut melingkupi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang memadai, sarana kesehatan primer, dan air minum yang layak untuk dikonsumsi (Nasution, 2002). Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut – dan memperkecil peluang dampak negatif dari pembangunan – pemerintah Indonesia secara global membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) setiap lima tahun. Rencana pembangunan tersebut dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, setiap daerah di Indonesia juga memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan RPJMN.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersendiri. RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022 mengacu kepada RPJMN III tahun 2015-2019. Dalam menyelesaikan problematika di Jakarta sendiri, dapat dilihat pada RPJMD



2017-2022 BAB IV mengenai “Isu Permasalahan dan Isu Strategis Daerah”. Terdapat permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur adalah penanganan produksi sampah yang masih belum 100 persen. Selain itu dalam permasalahan mengenai kota lestari masih terdapat air yang tercemar berat, air sungai mengalami penurunan kualitas, permukiman yang tertata menjadi berkurang, dan belum semua warga DKI Jakarta memiliki rumah yang layak.

Menanggapi permasalahan yang terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan langkah penyelesaian masalah dari RPJMD tahap empat ini. Pengolahan sampah dan limbah dilakukan dengan mengembangkan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dan mematangkan sistem pengolahan terpadu berupa *solid waste treatment* serta pengembangan sistem sanitasi yang mencakup seluruh kota. Kebutuhan akan air bersih dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota. Berikutnya, dalam menyelesaikan kebutuhan hunian layak dilakukan pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota serta menciptakan lingkungan kota yang bebas kumuh.

Kondisi kesehatan dan lingkungan yang baik dalam masyarakat memiliki pengaruh yang besar untuk mempermudah tercapainya rencana pembangunan di Indonesia. Namun, DKI Jakarta masih memiliki kawasan permukiman dengan kondisi lingkungan yang belum memenuhi standar kelayakan hidup masyarakat. Terdapat suatu permukiman di Jakarta Utara yang disebut dengan Kampung Kesepatan yang terletak di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing. Lokasi Kampung Kesepatan tersebut dikelilingi oleh sungai Cakung yang posisinya berada diatas lahan kampung itu sendiri. Ketika turun hujan yang bertepatan dengan pasang air laut akan mengakibatkan banjir yang biasa disebut dengan banjir rob. Pada umumnya banjir rob terjadi setinggi 20-140 *centimeter* (cm), yang tentunya akan menambah ketinggian dari banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi.

Saat terjadi hujan deras dan banjir yang menggenangi ibu kota DKI Jakarta pada awal tahun 2020 juga dirasakan oleh warga Kampung Kesepatan. Warga Kampung Kesepatan terpaksa harus mengungsi ke peti kemas milik perusahaan logistik yang berada di sebelah kampung tersebut karena permukimannya terendam habis oleh banjir



setinggi dua meter. Di dalam peti kemas tersebut berisikan satu keluarga besar. Dari 1.600 jiwa, setidaknya terdapat 1.000 jiwa yang harus mengungsi kurang lebih selama satu minggu (sumber: cnbcindonesia.com).

Sungai Cakung yang meluap karena banjir itu memiliki warna hijau gelap, dan tidak jarang menjadi berwarna hitam karena menjadi tempat pembuangan limbah dari pabrik tekstil yang berada di sekitar permukiman tersebut. Selain untuk memenuhi kegiatan mandi, mencuci, buang air, tidak jarang sungai tersebut dijadikan tempat untuk membuang sampah. Alasan pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarang dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan akhir di sekitar kampung tersebut. Terdapat beberapa kakus yang masih digunakan oleh warga setempat yang tentunya kotoran tersebut langsung mengalir ke sungai tanpa adanya filtrasi. Penggunaan kakus tersebut tidak lain karena warga sekitar masih belum memiliki *septic tank* untuk menampung air limbah dari manusia. Hanya beberapa warga yang memiliki MCK sendiri. Sehingga sanitasi yang dimiliki oleh warga Kampung Kesepatan masih jauh dari kata layak karena pembuangan berbagai macam limbah yang menjadi satu di sungai. Sedangkan dalam program 100-0-100

mengupayakan 100 persen sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Kondisi air tanah yang digunakan warga Kampung Kesepatan pun seperti jenis air wilayah Jakarta Utara pada umumnya, yaitu memiliki kadar besi yang tinggi sehingga berwarna kecokelatan dan berbau karat. Dalam kesehariannya, warga menggunakan air untuk mandi yang berasal dari air tanah ataupun air hujan yang ditampung. Air tersebut ditimba oleh warga melalui sumur buatan dengan proses penyaringan yang juga dilakukan secara manual oleh masing-masing warga. Secara kasat mata, air yang berada dalam sumur tersebut berwarna cokelat tanah dan berbau besi karat. Masyarakat cukup kesulitan untuk menggunakan pengelola air karena lokasi permukiman tersebut tidak terdaftar kepemilikannya dalam Kementerian ATR/BPN.

Deskripsi tersebut berdasarkan kondisi terkini yang masih dihadapi warga Kampung Kesepatan sampai di awal tahun 2020. Gambaran kehidupan masyarakat seperti yang dijelaskan masih terbilang belum layak – sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah memiliki program 100-0-100 untuk membantu meningkatkan kelayakan hidup masyarakat. Keadaan



tersebut menjadi kendala bagi masyarakat sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena kebutuhan primernya saja masih belum dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan dalam penelitian ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat upaya – baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta – dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi masyarakatnya. Apabila masih terdapat masyarakat dengan kondisi kehidupan jauh dari kata layak berdasarkan standar baku yang sudah ditentukan, secara tidak langsung telah memberi gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat belum berhasil dilakukan. Negara akan kesulitan untuk melakukan pembangunan secara massif apabila pembangunan pada tingkat terendah masih belum dapat terlaksana. Sehingga masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia untuk masyarakat yang termarginalkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat itu sendiri.

Distorsi Komunikasi Mengakibatkan Pembangunan Terhambat

Pembangunan menjadi sebuah pesan penting bagi masyarakat agar siap menghadapi perubahan yang terus terjadi di

dunia. Pemerintah memiliki peran yang begitu besar dalam menentukan bagaimana pembangunan akan dilakukan. Pada setiap penyampaian pesan mengenai pembangunan yang dilakukan, tidak seluruhnya dapat diterima secara utuh oleh masyarakat. Ditemukan berbagai gangguan yang menghambat proses komunikasi pembangunan – mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai ke tahap evaluasi. Salah satu bukti adanya gangguan komunikasi dalam pembangunan di Indonesia adalah Kampung Kesepatan, Cilincing, Jakarta Utara yang sampai saat ini masih belum mendapat sosialisasi maupun realisasi program 100-0-100 – ataupun program bantuan pemerintah yang dapat meningkatkan kelayakan hidup masyarakat di kampung tersebut.

Terjadi distorsi yang menghambat proses komunikasi pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah hingga kini. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai program pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat yang dibuktikan dengan ketidaktahuan pihak Kelurahan Rorotan mengenai program milik pemerintah pusat. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat juga tidak mengetahui adanya program kerja



pemerintah karena tidak mendapatkan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat dalam satu periode masih dapat terhitung dengan jari.

Di Kampung Kesepatan sendiri juga terjadi politik kepentingan yang menghambat informasi mengenai program kerja Kelurahan ataupun pemerintah DKI Jakarta kepada pihak masyarakat di Kampung Kesepatan. Sehingga masyarakat perlu memiliki inisiatif yang lebih tinggi untuk mencari tahu apa saja program kerja pemerintah melalui situs internet – sedangkan tidak segala hal yang tertulis di internet adalah hal yang benar dan membentuk penafsiran yang sama. Terlebih dari itu, faktor utama yang mengganggu proses komunikasi pembangunan di Kampung Kesepatan adalah status kampung yang belum menjadi Rukun Tetangga (RT) tersendiri.

Bentuk tugas dan strategi komunikasi pembangunan tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya karena tidak tersampainya pesan mengenai pembangunan nasional. Berdasarkan pandangan Schramm (1964) bahwa salah satu tugas komunikasi pembangunan adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembangunan

nasional. Dalam hal ini pihak Kelurahan belum melakukan sosialisasi mengenai program yang layak diterima oleh warga Kampung Kesepatan untuk membantu pemenuhan standar kelayakan hidup masyarakat dan mengakui tidak mengetahui program 100-0-100 yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Selain itu, masalah juga terus bermunculan karena kembali kepada masalah belum adanya status RT tersendiri pada Kampung Kesepatan.

Pada satu sisi pihak Kelurahan mengakui telah melakukan sosialisasi mengenai program kerja pemerintah provinsi terkait dengan kesejahteraan, pendataan keluarga, dan pendistribusian kartu kesejahteraan, tetapi tidak sampai kepada warga Kampung Kesepatan. Berdasarkan problematika tersebut, sosialisasi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan lebih baik lagi. Sosialisasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak Kelurahan sebagai wujud strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan untuk mendapat dukungan dalam melaksanakan program kerjanya. Seperti yang disampaikan AED (Rochajat & Elvinaro, 2011) bahwa terdapat empat jenis strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengkomunikasikan program kerjanya.



Lurah Rorotan sendiri sebenarnya sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam melayani masyarakat. Ketika terjadi banjir besar di DKI Jakarta pada awal tahun 2020, Lurah Rorotan turun langsung untuk membantu warga Kampung Kesepatan yang menjadi korban banjir. Dalam kondisi seperti itu, Lurah Rorotan mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan obat-obatan dengan berkoordinasi pada pihak terkait. Selain itu juga disediakan MCK, genset, dan air bersih dari Dinas Lingkungan Hidup (sumber: rakyatmerdeka.com).

Berita tersebut menjelaskan sikap tanggung jawab Kelurahan Rorotan terhadap wilayah yang dinaunginya. Namun, kinerja yang baik dari pihak Kelurahan akan menjadi sia-sia apabila tidak ada sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Seperti yang terjadi pada pengetahuan dan pelaksanaan akan program 100-0-100 di Kampung Kesepatan. Komunikasi yang dilakukan dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah ke masyarakat tidak berjalan dengan baik. Perlu adanya tinjauan langsung seperti yang dilakukan Lurah Rorotan agar tercipta komunikasi dua arah. Seperti yang dilakukan Lurah Rorotan ketika menangani banjir di wilayahnya. Lurah

Rorotan dapat melihat apa yang dialami warganya dan dapat mengerti apa yang dibutuhkan warganya apabila masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung.

Distorsi komunikasi pembangunan terjadi pada lingkup yang cukup besar. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, distorsi komunikasi pembangunan tidak hanya terjadi pada Kampung Kesepatan saja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Jaya (2017) juga ditemukan berbagai gangguan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah justru melemahkan rakyat kecil. Terdapat berbagai pemberitaan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian namun tidak terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Media konvensional sebagai salah satu sarana pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang diambil seringkali menggunakan opini yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pemerintah. Opini dalam pemberitaan tersebut yang juga menjadi pemicu dari perbedaan perspektif antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak ada komunikasi ataupun klarifikasi dari pemerintah untuk menanggapi tuduhan yang berasal dari media tersebut.

Demi terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat,



tentu diperlukan komunikasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan. Menurut Sumardjo (1999), komunikasi yang partisipatif dapat ditentukan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi dari program kerja yang diusung pemerintah secara runtun. Proses komunikasi partisipatif yang tidak terealisasi dengan baik tentunya akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan. Perencanaan program yang tidak diketahui masyarakat akan sulit untuk menarik partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai ranah yang lebih jauh pun – yaitu tahap pengawasan dan evaluasi – tidak dapat dilakukan karena ketidaktahuan terhadap kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program yang dimiliki pemerintah.

Pada era industri 4.0 ini sangat disayangkan masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan akses air bersih, sanitasi, rumah tinggal yang layak, dan bahkan kesulitan untuk mendapat realisasi dari program kerja di tingkat kelurahan. Tujuan pembangunan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pun menjadi lebih sulit lagi untuk dicapai ketika lebih banyak

kepentingan pribadi yang diutamakan dibandingkan kemaslahatan masyarakat. Sedangkan, Nasution (2002) menjelaskan bahwa dalam menghadapi era teknologi saat ini masyarakat memerlukan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang memadai, sarana kesehatan primer, dan air minum yang layak untuk dikonsumsi. Ilustrasi distorsi yang terjadi seperti pada Gambar 1.

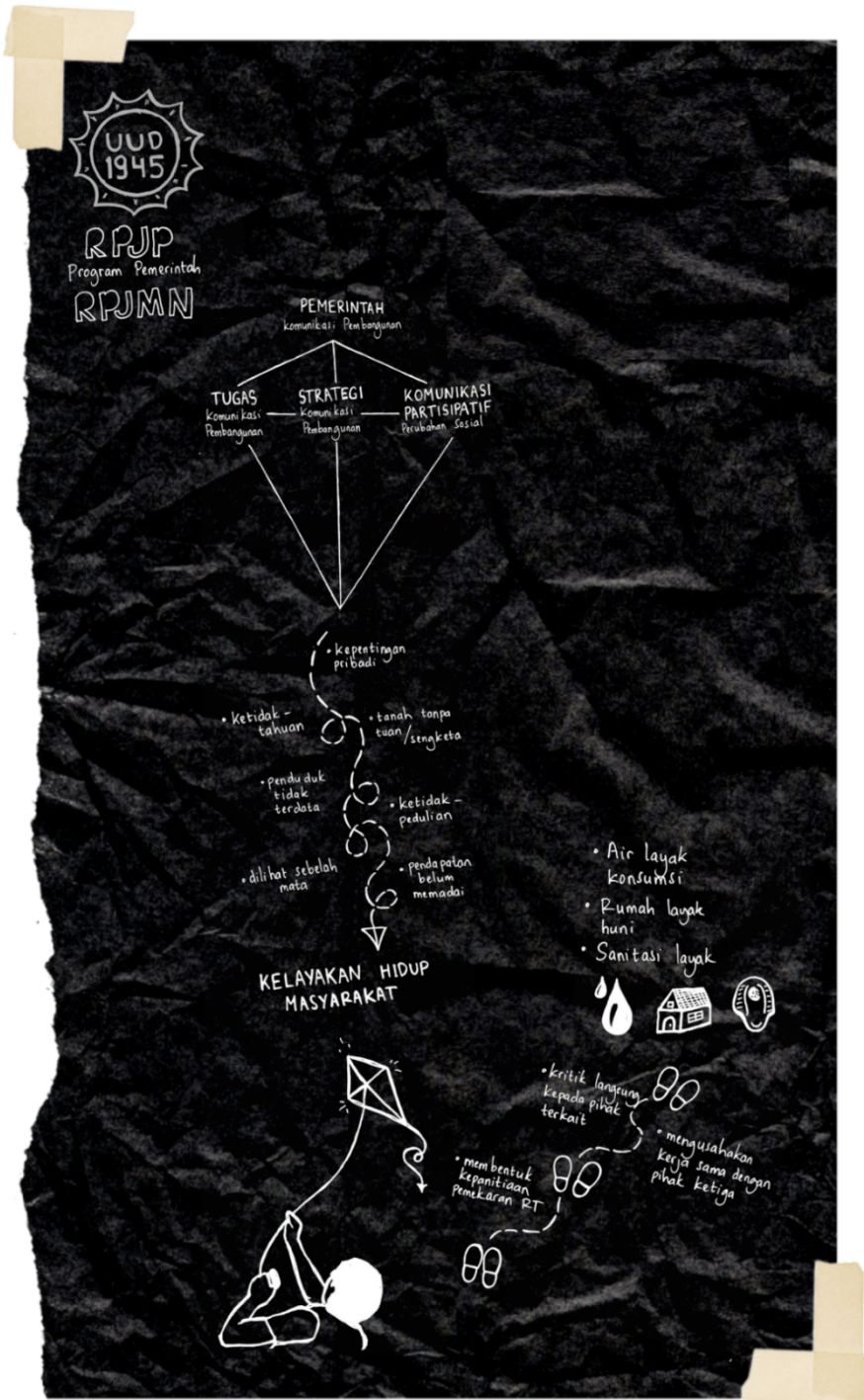
Sosialisasi dalam Komunikasi Pembangunan Mempermudah Terwujudnya Implementasi Kebijakan

Pembangunan yang dilakukan dalam skala nasional memerlukan strategi dan metode tertentu dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang terencana dan terprogram untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Midgley, 1995, h. 50). Terdapat tugas dari komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah agar mempermudah terciptanya tujuan dari pembangunan tersebut. Menurut pandangan klasik Schramm (1964), terdapat tiga tugas pokok komunikasi agar tercapainya pembangunan pada tingkat nasional. *Pertama*, pemerintah memberikan pengetahuan kepada



masyarakat mengenai pembangunan nasional, sehingga masyarakat dapat memusatkan perhatian terhadap perubahan,

mulai dari peluang dan bagaimana melakukan perubahan, dan menumbuhkan kembali aspirasi nasional.



Gambar 1. Ilustrasi Distorsi Komunikasi Yang Terjadi



Kedua, mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk andil dalam pengambilan kebijakan dan memperbesar ruang dialog agar dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemimpin masyarakat sampai ke rakyat kecil agar informasi dapat berlangsung dengan baik dari bawah ke atas dan sebaliknya. *Ketiga*, mendidik tenaga kerja penunjang pembangunan melalui pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat memberi pengaruh terhadap hidup masyarakat.

Tugas komunikasi pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Schramm (1964) tersebut sudah memberikan gambaran jelas bagi pemerintah untuk menjamin tercapainya pembangunan nasional dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk andil di dalamnya. Pengetahuan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah hak dari masyarakat itu sendiri – terutama karena Indonesia sendiri menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Dimana pemerintahan dengan bentuk demokrasi merupakan perwujudan kekuasaan yang berasal dari rakyat (An-Nahwi, 1989).

Tugas pokok dari komunikasi pembangunan tentunya akan mempermudah pelaksanaan program pembangunan yang dimiliki pemerintah. Pengetahuan mengenai pembangunan nasional dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Menurut AED (Rochajat & Ardianto, 2011) terdapat empat strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini. Strategi tersebut diantaranya adalah strategi media, desain instruksional, partisipatori, dan pemasaran. Saat ini, strategi media adalah salah satu cara yang paling mudah dilakukan dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa perlu bertatap muka namun tidak menutup kesempatan komunikasi dua arah. Selain itu, bentuk komunikasi pembangunan yang baik perlu memperhatikan aspek partisipasi masyarakat. Sumardjo (1999) juga menjelaskan komunikasi partisipatif sangat tepat digunakan dalam era globalisasi, karena pendekatan tersebut memungkinkan terjalinnya integrasi antara kepentingan nasional dengan kepentingan masyarakat dan potensi lingkungan setempat.

Dalam menghadapi problematika seperti yang terjadi pada Kampung



Kesepatan – salah satunya mengenai masalah kebersihan – pemerintah dapat menjelaskan pentingnya pengolahan sampah. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afdilah (2014). Menangani permasalahan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat mengenai kebersihan akan tumbuh dengan sendirinya apabila dibantu dengan adanya sosialisasi mengenai pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak. Jika terdapat sampah yang dapat didaur ulang, masyarakat dapat mengumpulkannya dan bekerja sama dengan pengepul agar sampah tersebut dapat diolah dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Adanya sistem pengelolaan sampah mandiri menurut kajian tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan masalah kebersihan.

Fitrianingsih (2018) melalui penelitian yang dilakukannya juga menemukan salah satu model pengembangan masyarakat yang efektif dilakukan adalah menggunakan model perencanaan sosial. Perencanaan sosial yang dilakukan telah membantu keberhasilan dari pelaksanaan program

kerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan program *baseline* dari program 100-0-100. Proses perencanaan sosial fokus kepada tujuan tugas, dimana proses perencanaan sampai tahap evaluasi melibatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat yang menjadi subjek dalam proses tersebut. Sedangkan pada tahap pelaksanaan menggunakan model pengembangan aksi sosial dan fokus pada tindakan aktual berupa pelatihan.

Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati (2019) yang menemukan keberhasilan dari bentuk komunikasi pemberdayaan. Tindakan komunikatif yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan empat klaim menurut teori tindakan komunikatif dari Habermas dalam proses pemberdayaan memperlihatkan keberdayaan masyarakat dalam berkomunikasi yang menggerakkan mereka pada suatu kondisi kehidupan yang didasari oleh adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama. Sehingga menciptakan fungsi kelompok-kelompok sosial menjadi ruang-ruang publik bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan bereksresi, sehingga menumbuhkan emansipasi dan solidaritas di kalangan masyarakat.



Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, pemangku kebijakan perlu melakukan sosialisasi program rencana pembangunan agar masyarakat mengetahui dan mengerti apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga perlu diberikan wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Damsar (2011) menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses seseorang untuk menghayati norma-norma kelompok dimana ia hidup dan bertempat tinggal. Sehingga sosialisasi dapat dijadikan salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan yang berlaku dan menjadi salah satu upaya yang mudah dilaksanakan.

Sosialisasi merupakan salah satu strategi komunikasi dalam kehidupan masyarakat yang akan memudahkan setiap individu untuk memahami maksud dan tujuan dari program pembangunan. Melalui sosialisasi dapat memperkenalkan informasi baru dan menjadi sarana bertukar informasi dari pemangku kebijakan kepada masyarakat. Keberhasilan dari komunikasi yang terjadi dua arah pada penelitian tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah dapat terlaksana. Kebijakan tersebut memerlukan kesepahaman di antara kedua belah pihak.

Hasil dari pelaksanaan sosialisasi yang baik nantinya dapat mempermudah terciptanya implementasi kebijakan karena telah menumbuhkan pengetahuan. Esensi utama dalam implementasi kebijakan itu sendiri adalah sebagai nilai ideal yang dijadikan acuan apa yang seharusnya terjadi. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan terhadap keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat berbentuk perintah ataupun keputusan eksekutif yang penting. Pada umumnya, keputusan tersebut dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi dengan menyebutkan secara jelas mengenai tugas dan sasaran, serta bagaimana cara mengimplementasikannya.

Dalam pembahasan ini, sosialisasi menjadi nilai penting yang perlu diusahakan. Namun, sosialisasi tidak berhenti hanya pada tahap menyampaikan pesan yang dimaksud. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan memerlukan langkah yang berkelanjutan. Aneta (2010) melalui penelitiannya telah menemukan bahwa pendidikan dan keterampilan dengan bentuk pelatihan,



kursus, pemberian bantuan modal bagi kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, dan program pembangunan rumah layak huni, serta kegiatan pendampingan teknis berhasil dilakukan untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Gorontalo. Sehingga penelitian-penelitian tersebut telah memberi bukti dan cara terbaik untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Sampai saat ini, nilai ideal yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 yang berisikan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebagai landasan dasar bernegara, setiap

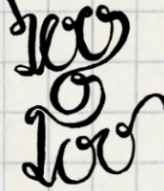
kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terciptanya nilai-nilai tersebut diturunkan melalui berbagai cara, salah satunya melalui rencana pembangunan daerah dan nasional. Kondisi sosial yang beragam di berbagai daerah di Indonesia sangat sulit untuk memastikan keseragaman pemahaman nilai-nilai Pancasila dan atau implementasi nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Sehingga diperlukan komunikasi yang masif dan strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nilai kesepahaman akan muncul dengan sendirinya seiring dengan kesetaraan pengetahuan yang didapatkan. Ilustrasi solusi yang dapat dilakukan seperti pada Gambar 2.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM 100-0-100 DI
JAKARTA GUNA PENINGKATAN KONDISI SOSIAL
MASYARAKAT DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

(Kajian dalam
Perspektif Komunikasi
Pembangunan)



Distorsi komunikasi
menghambat proses
pelaksanaan program 100-0-100



Sosialisasi menjadi salah satu
solusi alternatif untuk memperbaiki
proses komunikasi yang terjadi

Proses komunikasi yang berjalan
dengan baik dapat mempermudah
pelaksanaan program 100-0-100
bagi seluruh masyarakat yang
layak mendapatkannya



Gambar 2. Ilustrasi Solusi Yang Dapat Dilakukan



PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis mengenai implementasi kebijakan program 100-0-100 di Jakarta masih ditemukan daerah yang termarjinalkan. Program 100-0-100 belum terlaksana di Kampung Kesepatan, Rorotan, Jakarta Utara. Sedangkan kampung tersebut memiliki kondisi yang sangat layak untuk mendapat bantuan program 100-0-100 karena menyangkut masalah air bersih dan permukiman layak. Ditemukan berbagai problematika yang menghambat pelaksanaan program 100-0-100. *Pertama*, perbedaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah terhadap program 100-0-100 yang menyebabkan masyarakat tidak mendapat informasi mengenai program tersebut. *Kedua*, adanya kepentingan pribadi yang menghambat akses bantuan program pemerintah kepada masyarakat setempat. *Ketiga*, belum terlaksananya koordinasi yang baik dari pemerintah pusat ke pemerintah kota ataupun daerah untuk memberikan informasi mengenai program kerja pemerintah pusat yang mengakibatkan tidak adanya sosialisasi program untuk masyarakat. *Keempat*, lokasi kampung Kesepatan masih belum terdaftar

dalam Kementerian ATR/BPN dan tidak diketahui pemilik tanah tersebut. *Kelima*, banyaknya penduduk yang masih belum terdata karena kurangnya kepedulian terhadap pentingnya catatan sipil. Permasalahan tersebut yang menjadi penyebab bagi warga Kampung Kesepatan menjadi kesulitan untuk mendapatkan realisasi program kerja pemerintah. Usaha advokasi yang dilakukan dari pihak warga sendiri pun menjadi terhambat karena permasalahan administrasi yang tidak lengkap.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis hendak memberikan saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut:

1. Diperlukan sinergitas antara institusi, baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan komunitas, ataupun pemerintah dengan masyarakat dalam proses perencanaan sampai ke tahap evaluasi kebijakan. Selain itu, sinkronisasi kebijakan tingkat daerah dengan kebijakan tingkat nasional menjadi penting agar tujuan pembangunan secara nasional dapat berlangsung dengan baik.



2. Seluruh elemen aparatur sipil negara mengutamakan keperluan masyarakat dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi agar dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Otoritas yang dimiliki diharapkan dapat mewakili aspirasi dari masyarakat yang termarginalkan.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing, ataupun Kelurahan Rorotan selaku pemerintah setempat harus mengedepankan sosialisasi mengenai program pembangunan yang dimiliki pemerintah agar masyarakat mengetahui hak-haknya dan pemerintah menyadari kewajibannya.
4. Dinas-dinas terkait perlu melakukan tinjauan langsung untuk melihat lokasi Kampung Kesepatan dan berusaha untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat, diantaranya:
 - a. Dinas Sosial melakukan sensus dan sosialisasi rumah ke rumah mengenai pentingnya pendataan penduduk sipil, terutama bagi masyarakat yang memerlukan bantuan kesejahteraan.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup meninjau kebersihan lingkungan dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup.
 - c. Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana (PPSU) membantu masyarakat untuk menjaga kebersihan – terutama kebersihan saluran air agar tidak disalahgunakan untuk membuang sampah sembarangan.
5. Bekerja sama dengan pihak ketiga – seperti perusahaan, lembaga, atau komunitas yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah bekerja sama dengan komunitas Sanggar Belajar Orang Pinggiran (SBOP) yang ada di Kampung Kesepatan itu sendiri. Kerja sama dapat berupa pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat setempat dengan



komunitas SBOP sebagai jembatan penghubung untuk memudahkan pihak pemerintah agar diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdilah, N. H. 2014. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Community Development (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Dusun Sukunan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta)*. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Adnan Ali Rida al-Nahwi. 1992. *al-Shura La Dimoqratiyyah*. Dar al-Nahwi: Riyadh
- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Aneta, A. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No. 1.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka*. Diakses pada 9 Januari 2020.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Kencana, Jakarta.
- Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. 2016. *Kebijakan, Strategi, dan Program Keterpaduan Penanganan Kumuh Perkotaan*.
- Fitrianingsih, I. N. 2018. *Model Pengembangan Masyarakat Melalui Program KOTAKU (Studi Analisis di Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal)*. Semarang (ID): Univeristas Islam Negeri Walisongo.
- Jaya, P. H. I. 2017. *Distorsi Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14 No. 2: 259-276.
- John. 2019. *49 Persen Warga Jakarta Ternyata Kawasan Kumuh*. Diakses pada 2 Maret 2020, dari <https://poskota.id/2019/05/27/49-persen-wilayahjakartaternyatakawasan-kumuh/>.
- Kementerian Kesehatan.(2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32. Diakses pada



- 16 September 2019, dari <http://hukor.kemkes.go.id>.
- Lemhannas. 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Midgley, J. 1995. *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathrulsyah*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Nasution. 2002. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2018. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022*.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Diakses pada 9 Januari 2020, dari <http://djsn.go.id/storage/app/media/RPJM/BUKU%201%20RPJMN%2020152019.pdf>.
- Ratna dan Cardy. 2020. *Lurah Rorotan Terjun Langsung Bantu Warga Korban Kampung Sepatan*. Diakses pada 2 Maret 2020, dari <https://rakyatmerdekanews.com/2020/02/09/lurah-rorotan-terjun-langsung-bantu-warga-korban-banjir-kampung-sepatan/>.
- Rochajat, H. dan Elvaro, A. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Schramm, W. 1964. *Mass Media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries*. Paris: Stanford University Press.
- Setyowati, Y. 2019. *Komunikasi Pemberdayaan Sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 17 (2).
- Sumardjo. 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pembangunan Menuju Pengembangan Kemandirian Petani*. Bogor (ID): Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.



Susilo, T. 2020. *Penampakan Korban Banjir yang Terpaksa Mengungsi di Kontainer*. Diakses pada 2 Maret 2020, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020226183828-7140676/penampakan-korban-banjir-yang-terpaksa-mengungsi-di-kontainer/1>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34. *Tentang Fakir Miskin*.